

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan mekanisme pemerintahan, pada negara yang menganut bentuk negara kesatuan, dikenal dua pembagian pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat, yang mencakup seluruh perangkat penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari semua departemen dan badan pemerintahan yang ditentukan oleh presiden. Pemerintahan daerah yang terbagi atas pemerintahan daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*local selfgovernment*) dan pemerintahan wilayah (*local stategovernment*) yang berfungsi sebagai pelaksanaan tugas pemerintah pusat.¹

Berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang pernah dijalankan di Indonesia adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu.² Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Secara formal pemerintah daerah memiliki kewenangan daerah yang sering disebut “Otonomi Daerah” yang diartikan sebagai hak wewenang

¹ Bayu Suryaningrat, *Organisasi Pemerintah Wilayah/Daerah*, (Jakarta: Aksara Baru, hlm, 1980), hlm.19

² Asas Desentralisasi adalah asas penyelenggara sebagian urusan dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasannya, kepada pejabat-pejabat di daerah. Asas Dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Tugas pembantu adalah asas untuk turut sertanya pemerintahan daerah oleh pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah tingkat atasannya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. (C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 21)

dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.³

Implementasi otonomi daerah bukan tanpa masalah. Otonomi daerah membawa pengaruh terhadap sistem pemerintahan daerah. Adapun pengaruh otonomi daerah tersebut antara lain pemilihan kepala daerah langsung, hubungan antara provinsi dengan kabupaten/kota, hubungan antara kewenangan eksekutif dan legislatif, keuangan pusat dan daerah, sentralisasi-desentralisasi, distorsi putera daerah, dan kemunculan raja lokal, serta timbulnya konflik batas wilayah dan pemekaran wilayah.⁴ Hal ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah Daerah Riau.

Berbicara mengenai Otonomi daerah dan desentralisasi di Riau adalah suatu hal yang menarik untuk diteliti. Berdengungnya momentum perubahan (reformasi) tahun 1998, mengakibatkan munculnya gerakan menuntut Riau merdeka yang dipelopori oleh kalangan intelektual kritis di Riau dengan basis pendukung utamanya adalah mahasiswa. Munculnya tuntutan Riau merdeka terkait erat dengan lambatnya respon pemerintahan pusat terhadap tuntutan bagi hasil minyak antara pusat-daerah dan distorsi putra daerah.⁵

Era otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan yang berlangsung zaman reformasi, merupakan pengulangan gejala-gejala yang pernah terjadi pada

³ Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 64

⁴ HAW Widjaya, *Titik Berat Otonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 213

⁵ Heri Suryadi, "Bendera Riau Merdeka Akhirnya Berkibar", *Teraju*, Edisi April-Mei 2009, hlm. 35-36

tahun 1950-an. Tuntutan-tuntutan yang muncul di atas sudah ada pada saat Riau masih berstatus keresidenan di bawah Pemerintahan Sumatera Tengah.

Pada tanggal 15 April 1948, ketika keluarnya Undang-Undang No. 10 tentang Pemecahan Sumatera Tengah menjadi tiga provinsi, Sumatera Tengah memiliki dua belas kabupaten yaitu terdiri dari tujuh buah di Keresiden Sumatera Barat lama (Kabupaten Padang/Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci), tiga di Riau (Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri, Kabupaten Bengkalis), dan dua Jambi (Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batanghari).⁶ Ini berarti Jumlah kabupaten di Sumatera Barat lebih besar dari jumlah kabupaten yang ada di Riau dan Jambi bila disatukan.

Pada tanggal 10 Juli 1948 Keluarnya UU NO.22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan daerah. Pada Bab I, pasal 1 UU dikatakan bahwa daerah negara RI tersusun atas tiga tingkatan, yakni provinsi, kabupaten (kota besar), dan desa (kota kecil, negeri, marga, dan sebagainya. Dalam merespon keluarnya undang-undang tersebut maka dibentuklah Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah, yang bertugas merancang bentuk dan jumlah pemerintahan tingkat kabupaten dan desa (atau daerah terendah) yang ideal untuk Sumatera Tengah.⁷ Pembagian daerah ini dirancang untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh dari kepala-kepala adat dan sultan-sultan/raja-raja yang kurang mendukung kesatuan nasional Indonesia.

⁶ Gusti Asnan. *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. (Yogyakarta: PT. Citra Pustaka, 2006), hlm. 143

⁷ *Ibid.*

Pada tanggal 25 November 1948 Panitia Desentralisasi telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Ada dua keputusan penting yang dibuatnya. Pertama, menghapus keberadaan pemerintahan keresidenan. Kedua, menata ulang jumlah kabupaten dibekas Keresidenan Sumatera Barat dari tujuh menjadi lima (Kabupaten Singgalang, Kabupaten Sinamar, Kabupaten Samudra, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci), di Riau menjadi empat (Kabupaten Kampar, Kabupaten Inderagiri, Kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Riau) dan Jambi tetap dua (Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batang Hari).⁸

Berdasarkan keputusan Panitia Desentralisasi jumlah kabupaten di Riau dan Jambi jika digabungkan lebih banyak dibandingkan kabupaten di Sumatera Barat. Dengan demikian Sumatera Barat tidak bisa mendominasi dalam pengambilan keputusan melalui voting, terutama dalam pembagian jatah pembangunan.

Keputusan ini belum sempat terlaksana karena datangnya serangan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 yang dikenal dengan Agresi Belanda ke II. Setelah itu oleh pemerintahan militer di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi diadakan penataan jumlah kabupaten yang sesuai dengan kebutuhan perangnya. Di Sumatera Barat dijadikan delapan (Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci, dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung), di Riau dijadikan empat (Kabupaten Kampar, Kabupaten Inderagiri, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Riau) dan di Jambi tetap dua (Kabupaten

⁸Dep. Penerangan, *Provinsi Sumatera Tengah*, (Jakarta, 1953), hlm. 352

Merangin, dan Kabupaten Batanghari). Jumlah kabupaten ini kemudian dikukuhkan oleh pemerintahan provinsi pada pertengahan tahun 1950.⁹

Pembagian Jumlah kabupaten yang tidak seimbang di Sumatera Tengah ini membawa permasalahan bagi daerah. Jumlah kabupaten di Riau dan Jambi lebih sedikit dibandingkan kabupaten yang berada di Sumatera Barat. Keputusan pemerintahan provinsi tersebut menimbulkan perasaan keberatan dan tidak puas di kawasan Riau. Hal inilah salah satunya jadi tuntutan masyarakat Riau untuk lepas dari dominasi orang Sumatera Barat dalam Pemerintahan Sumatera Tengah.

Ketidakpuasan tersebut disuarakan dalam bentuk tuntutan oleh wakil rakyat Kampar dihadapan rombongan *Acting* Gubernur Sumatera Tengah yang tengah mengadakan kunjungan kerja ke daerah Riau yang berlangsung antara tanggal 18 sampai dengan 25 Februari 1951. Tuntutan tersebut meminta agar jumlah kabupaten dibekas ketiga keresidenan tersebut dikembalikan kepada jumlah yang ditetapkan oleh panitia desentralisasi sebelum Agresi Militer Belanda kedua, yakni lima buah di Sumatera Tengah, empat buah di Riau dan dua buah di Jambi. Tuntutan wakil rakyat Kampar ini adalah ungkapan ketidakpuasan pertama warga Riau terhadap kebijaksanaan pemerintahan Sumatera Tengah.¹⁰

Dalam hal pembangunan daerah masyarakat Riau juga merasakan ketidakpuasan, terutama pembangunan pendidikan di Riau. Di Sumatera Barat pada tahun 1954 sudah didirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di

⁹ Gusti Asnan. *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. (Yogyakarta: PT. Citra Pustaka, 2006), hlm. 143

¹⁰ H.M. Amien adalah anggota DPK Kampar, yang merupakan salah satu pendukung gagasan penata ulang jumlah kabupaten di Sumatera Tengah. Selama tahun 1950-an beliau termasuk tokoh yang banyak mengkritik dominasi orang Sumatera Barat di Pemerintahan Sumatera Tengah. (Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hlm. 221)

Batusangkar dan Perguruan Tinggi Negeri Pertanian di Payakumbuh, tahun 1955 berdiri Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam, di Bukittinggi pada tahun 1955, serta Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.¹¹ Tetapi untuk daerah Riau sendiri adanya SMA saja sangat sulit. Riau daratan yang begitu luas hanya ada satu SMA, itupun sumbangan gedung dari Caltex yang didirikan di Pekanbaru. Untuk tingkat SMP tahun 1950-an, di Propinsi Sumatera Tengah tercatat 27 sekolah SMP Negeri. Dari angka itu, hanya empat SMP saja yang berada di Keresidenan Riau.¹²

Begitu pula dengan Sekolah Teknik Pertama (STP), Sekolah Teknik (ST), dan Sekolah Teknik Menengah (STM) yang semuanya berjumlah 14 buah. Hanya satu yang dimiliki Riau (Pekanbaru) dan satu lagi di Jambi, selebihnya 12 sekolah berada di Sumatera Barat. Sekolah untuk melahirkan tenaga-tenaga guru yang di bangun Provinsi Sumatera Tengah dalam tahun 1950-an, semuanya berada di Bukittinggi.¹³

Menjadi ironis jika dibandingkan dengan kenyataan pembangunan di daerah Riau ketika berada dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dengan kekuatan ekonomi daerah Riau yang didukung oleh sumber-sumber ekonomi Riau. Salah satunya, pertambangan minyak PT. Clatex Pasific Indonesia yang mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 1952 hanya 15.000 barrel perhari

¹¹ Kelima fakultas itu merupakan cikal bakal dalam pendirian Universitas Andalas yang diresmikan tahun 1956 oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta (<https://www.unand.ac.id>, Universitas Andalas-Sejarah Ringkas (diakses tanggal 24 Januari 2019))

¹² Taufik Ikram, dkk., *Dari Percikan Membentuk Propinsi Riau*, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2002), hlm. 31

¹³ *Ibid*, hlm.32

sampai tahun 1957 naik jadi 147.000 barrel perhari.¹⁴ Dengan demikian masyarakat Riau berkeyakinan bahwa niscaya daerah Riau dapat lebih makmur jika dibandingkan dengan hanya terus berada di bawah pemerintahan Sumatera Tengah.

Ketidakpuasan juga terlihat dari kecemburuan masyarakat Riau terhadap kebijaksanaan kepegawaian dan personalia yang diserahkan kepada tenaga-tenaga dari Sumatera Barat seperti Bupati, Wedana, dan Camat-camat di Kepulauan Riau. Kepala-kepala kantor dan jawatan diisi dengan tenaga dari Sumatera Barat.¹⁵

Tambah lagi dalam penolakan DPRST terhadap pengangkatan Ruslan Mulyoharjo, pengganti Moh. Nasrun sebagai Gubernur Sumatera Tengah sangat menyinggung perasaan warga Riau, sebab dimata orang Riau pengangkatan tersebut sudah sangat tepat. Ruslan adalah figur yang sangat tepat memimpin Sumatera Tengah, dia netral, tidak mewakili Sumatera Barat Riau atau Jambi. Namun empat tokoh yang diajukan DPRST adalah tokoh-tokoh dari Sumatera Barat. Jadi pengangkatan Ruslan sebagai wakil orang Riau dan Jambi tidak mendapat tempat di mata DPRST.¹⁶ Dari kejadian di DPRST tersebut memberikan pelajaran bagi masyarakat Riau dengan mengangkat isu agar putera daerah diangkat sebagai Gubernur dengan demikian juga menumbuhkan semangat masyarakat Riau untuk keluar dari Sumatera Tengah.

¹⁴*Ibid*, hlm.36

¹⁵Ahmad Yusuf, dkk., *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau II 1942-2002 buku I* (Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa, 2006), hlm.366

¹⁶Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hlm. 220

Pada tahun 1953 muncul desakan yang berasal dari daerah Kepulauan Riau yang menuntut agar diberikan otonomi luas atau seluas-luasnya bagi daerah Kepulauan Riau. Seiring dengan tuntutan tersebut, Riau Daratan juga berkeinginan keluar dari Sumatera Tengah. Tuntutan itu dinyatakan dengan usulan menghidupkan kembali Swapraja Siak.¹⁷

Pada kenyataan inilah masyarakat Riau berjuang untuk berpisah dari Sumatera Tengah dan membentuk Provinsi Riau sendiri. Usaha memperjuangkan pembentukan Provinsi Riau dimulai pada tahun 1953 melalui kongres rakyat Riau hingga diperjuangkan pada Tingkat DPRDS dan Parlemen. Dalam proses penyelesaian persoalan Riau ini, terjadi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan lambatnya proses pemisahan diri Keresidenan Riau dari Sumatera Tengah. Salah satunya yaitu tahun 1956 terjadinya peristiwa Dewan Benteng di Sumatera Tengah tahun yang berkelanjutan dengan meletusnya pemberontakan PRRI.

Kelahiran Provinsi Riau karena perjuangan rakyat ditengah-tengah usaha memperjuangkan keutuhan negara Indonesia. Pembentukan Provinsi Riau, ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno tanggal 19 Agustus 1957 di Bali, yang berisi tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat I, yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Dengan sendirinya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 4 Tahun 1950 yang menggabungkan Sumatera Barat Riau dan Jambi dalam satu Provinsi Sumatera Tengah dihapuskan. Kemudian pada tanggal 25 Juli 1958 diundangkan lagi dalam Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 (Lembaran

¹⁷ *Ibid*, hlm. 225

Negara No. 75 Tahun 1957) dinyatakan bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah tingkat II yaitu: Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau yang termaktub dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 25), dan Kota Praja Pekanbaru yang termaktub dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1956 No. 19.¹⁸ Keluarnya undang-undang tersebut maka secara resmi Riau menjadi propinsi tersendiri dan terpisah dari Sumatera Tengah.

Pascaberpisah dari Sumatera Tengah, ditemukan fenomena-fenomena di lapangan sehubungan dengan perjalanan sejarah pemerintahan daerah Riau, antara lain: *pertama*, ketika muncul tuntutan-tuntutan di era tahun 1950-an keinginan masyarakat Riau untuk berpisah dari Sumatera Tengah dan memimpikan dipimpin oleh putra daerahnya sendiri, dengan asumsi bahwa jika Riau dipimpin oleh putra daerah maka kesejahteraan masyarakat Riau akan lebih diperhatikan. Akan tetapi pada kenyataannya setelah berpisah dari Sumatera Tengah pada tahun 1957, Gubernur Riau didominasi oleh orang-orang yang berasal dari luar daerah Riau, bukan putra daerah Riau seperti yang mereka kehendaki. Justru keinginan dipimpin oleh putra daerahnya baru dapat terwujud ketika pasca reformasi. Suasana putra daerah pada masa reformasi memberikan peluang bagi putra daerah untuk terpilih sebagai kepala daerah, namun gubernur-gubernur putra daerah pilihan rakyat itu diakhir masa jabatannya tersandung kasus korupsi.

Kedua, ketika adanya ketidakpuasan terhadap pembagian daerah kabupaten pada masa pemerintahan Sumatera Tengah dan adanya keinginan untuk memekarkan wilayah apabila Riau menjadi sebuah Provinsi. Setelah

¹⁸ Undang-Undang No. 61 Tahun 1958

berpisah dari Provinsi Sumatera Tengah, kenyataannya tidak begitu tampak perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan kabupaten di wilayah Riau. Pada awal berdiri menjadi provinsi, Riau diistilahkan dengan Daerah Swatantra Tingkat I yang meliputi Daerah Swatantra Tingkat II seperti Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau dan Kotapraja Pekanbaru.¹⁹

Ketiga, Ketika berada dalam pemerintahan Sumatera Tengah masyarakat Riau merasakan ketidak seimbangan dalam pembangunan di daerah Riau, justru pascakeluar dari Sumatera Tengah tidak begitu tampak perubahan signifikan terhadap perkembangan pembangunan daerah Riau dari berbagai aspek. Pembangunan infrastruktur daerah Riau lebih diutamakan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan swasta yang berada di wilayah Riau. Begitu juga dari segi perekonomian masyarakat Riau, SDA Riau yang kaya raya tidak mampu membawa kesejahteraan masyarakat Riau. Hal ini dapat dilihat dari gambaran rata-rata pendapatan penduduk Riau di bawah rata-rata pendapatan penduduk Indonesia.²⁰

Ketika tuntutan yang diimpikan-impikan tersebut dirasakan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Riau namun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah. Dari fenomena-fenomena di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemerintahan daerah Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah.

¹⁹ Tim Universitas Riau, *Sejarah Riau Masa Kemerdekaan sampai Orde Baru RI*, (Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa, 2006) hlm. 87

²⁰ Gambaran pendapatan perkapita penduduk Riau Tahun 1983-1987 tanpa minyak bumi hanya sebesar US\$ 200, sedangkan rata-rata pendapatan penduduk Indonesia lebih tinggi sebesar US\$ 287

Permasalahan utama yang akan dicari jawabannya adalah apa yang sesungguhnya terjadi dengan gagasan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan yang dewasa ini tengah dilaksanakan umumnya di Indonesia, khususnya Riau. Dari pengalaman masa lampau itu, kita akan lebih bisa memahami berbagai persoalan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan di daerah Riau.

Selain itu penelitian ini juga kiranya penting dilakukan, melihat penelitian terdahulu yang hanya mengkaji keadaan Riau secara umum. Penelitian ini akan mengungkap persoalan tentang pemerintahan daerah Riau di masa lampau secara khusus. Antara lain mengenai persoalan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah di bidang legislatif dan eksekutif, unit-unit administrasi daerah, serta beberapa kejadian yang khas untuk masing-masing periode pemerintahan daerah Riau dan juga mengkaitkan sejauh mana pemerintahan daerah Riau tersebut mampu membawa perubahan baik dalam membangun infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat Riau.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan di atas pada Pemerintahan Daerah Riau, maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian ini dengan judul: "*Riau Pascakeluar dari Sumatera Tengah 1957-1985*".

1.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Ketika menjadi bagian dari Sumatera Tengah pada tahun 1948, masyarakat Riau merasakan beberapa ketimpangan dalam pembangunan daerah di Riau. Di antaranya pembagian wilayah yang tidak seimbang antara Sumatera Barat yang

lebih banyak dibandingkan Riau, pembangunan infrastruktur daerah Riau yang tidak memadai jika dibandingkan dengan Sumatera Barat, serta persoalan pemegang kekuasaan yang didominasi oleh orang-orang Sumatera Barat. Persoalan-persoalan tersebut memunculkan tuntutan-tuntutan masyarakat Riau untuk keluar dari Sumatera Tengah ditahun 1950, adanya keinginan masyarakat Riau untuk dipimpin oleh putera daerah Riau dengan harapan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Riau.

Dari uraian persoalan diatas fokus penelitian ini adalah mengenai persoalan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah di bidang legislatif dan eksekutif, unit-unit administrasi daerah, serta beberapa kejadian yang khas untuk masing-masing periode pemerintahan daerah Riau dan juga mengkaitkan sejauh mana pemerintahan daerah Riau tersebut mampu membawa perubahan baik dalam membangun infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi dan kondisi Riau pada masa Pemerintahan Sumatera Tengah?
2. Mengapa masyarakat Riau ingin keluar dari Sumatera Tengah dan bagaimana usaha dalam mencapai tuntutannya keluar dari Sumatera Tengah?
3. Bagaimana kondisi pemerintahan Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah?

4. Bagaimana pembangunan di daerah Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah serta kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat Riau?

1.2.2. Batasan Masalah

Penelitian ini mencoba mengungkapkan berbagai persoalan tentang pemerintahan daerah Riau di masa lampau. Dengan batasan masalah dari tahun 1957-1985. Adapun Pemilihan batasan waktu tahun 1957 yaitu berdasarkan keputusan pada tanggal 9 Agustus 1957 yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 75 dengan UU Darurat No. 19 Tahun 1957 yang berisi tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat I, yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Keluarnya Undang-Undang tersebut Riau resmi keluar dari Sumatera Tengah. Tahun 1985 adalah batas akhir penelitian penulis yaitu dengan timbulnya Peristiwa 2 September 1985 yang merupakan gerakan perlawanan terhadap hegemoni pemerintahan pusat yang berlangsung pada saat Orde Baru dan ABRI (TNI) Tengah berjaya, peristiwa dimana anggota Fraksi Karya Pembangunan DPRD Provinsi Riau melawan keinginan pemerintahan pusat untuk memilih Imam Munandar sebagai Gubernur Riau. Jadi tahun 1957 Riau lepas dari dominasi Pemerintahan Sumatera Tengah (khususnya Sumatera Barat) sedangkan 1985 berusaha untuk lepas dari dominasi pemerintahan pusat.

Batasan Wilayah yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah Riau. Riau yang dimaksud adalah sebuah Propinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tengah Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang Pesisir Selat Malaka. Riau yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Riau pada awal berdiri menjadi provinsi yang diistilahkan dengan Daerah Swatantra Tingkat I, yang meliputi

Daerah Swatantra Tingkat II seperti Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau dan Kotapraja Pekanbaru.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan posisi dan kondisi Keresidenan Riau pada masa Pemerintahan Sumatera Tengah?
2. Menjelaskan penyebab masyarakat Riau ingin keluar dari Sumatera Tengah dan bagaimana usaha dalam mencapai tuntutannya keluar dari Sumatera Tengah?
3. Menjelaskan bagaimana kondisi pemerintahan Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah?
4. Menjelaskan pembangunan di daerah Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah serta kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat Riau?

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pertama, Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pada khasanah ilmu sosial terutama menyangkut pemerintahan daerah umumnya dan sejarah Pemerintahan Daerah Provinsi Riau pada khususnya.
- b. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pemerintahan daerah Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah.
- c. Sebagai pengembangan kemampuan peneliti untuk mengasah daya pikir kritis, sistematis dan komprehensif di bidang kesejarahan.

Kedua, Manfaat Praktis:

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Humaniora Program Studi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- b. Memberikan sumbangan analisis sejarah tentang perubahan pemerintahan daerah Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah Tahun 1957-1985. Serta sebagai bahan masukan bagi pihak eksekutif dan legislatif untuk mengetahui pengalaman pemerintah daerah di masa lampau guna menyikapi perkembangan yang terjadi di masa kini serta merumuskan kebijaksanaan untuk masa yang akan datang.
- c. Memperkaya kepustakaan tentang penulisan pemerintahan daerah Riau dan menjadi bahan bacaan bagi peminat sejarah atau mahasiswa sejarah yang ingin mengetahui pemerintahan daerah Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah.

1.4. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini sudah ada kajian dan karya yang membahas tentang Riau, di antaranya: Sejarah Riau yang disusun oleh Tim Universitas Riau yang terdiri atas tiga jilid. Jilid I berjudul *Sejarah Riau Masa Prasejarah sampai kedatangan Kolonialisme*. Jilid II berjudul *Sejarah Riau Masa Kolonialisme hingga Kemerdekaan RI*. Jilid III berjudul *Sejarah Riau Masa Revolusi Kemerdekaan sampai Orde Baru*. Secara garis besar ketiga buku ini menceritakan tentang keadaan di daerah Riau dari masa pra sejarah sampai dengan orde baru. Buku-buku ini cukup memberikan kontribusi yang relevan bagi karya tulis penulis dalam memaparkan kondisi Riau terutama dalam bidang politik pada masa sesudah kolonial sampai Orde Baru, namun dibidang lain seperti perkembangan

pembangunan ekonomi dan infrastruktur daerah tidak diterangkan secara terperinci dalam buku tersebut.

Buku Dari *Percikan Kisah Membentuk Provinsi Riau* karya Taufik Ikram Jamil, dkk buku ini berisi tentang gambaran keadaan Riau ketika berada dalam Pemerintahan Sumatera Tengah, dalam buku ini juga tergambar adanya kecemburuan sosial masyarakat Riau terhadap orang-orang Sumatera Barat dalam memonopoli kekuasaan baik dibidang politik maupun ekonomi. Dalam buku ini keadaan Riau setelah Riau menjadi Provinsi tidak diceritakan dalam buku ini.

Kemudian sebagai bahan rujukan buku *Peristiwa 2 September 1985, Tragedi Riau menegakkan Demokrasi* oleh Zaili Asril, buku ini berisi tentang gerakan perlawanan terhadap tirani pemerintahan pusat yang berlangsung pada saat Orba (Orde Baru) dan ABRI (TNI) Tengah berjaya. Buku ini cukup memberikan konstribusi yang relevan bagi karya tulis penulis dalam memaparkan kondisi pergantian pemerintahan daerah pada lembaga eksekutif masa orde baru, tetapi untuk lembaga legislatif tidak diceitakan dalam buku ini.

Buku Gusti Asnan juga dapat dijadikan bahan rujukan di antaranya: (1) *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi* dalam buku ini memperlihatkan keterkaitan Riau dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari adminitrasi Pemerintahan Sumatera Tengah, (2) *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat*. Tulisan dalam buku ini tentang Riau sebagai bagian dari pokok permasalahan politik yang terjadi di Sumatera Barat.

Selain buku, juga ada jurnal membahas tentang Riau di antaranya: (1) “Ma’rifat Marjani Sebagai Salah Seorang Pendiri Provinsi Riau” oleh Bunari,

tulisan ini membahas tentang biografi Ma'rifat Marjani dan peranannya sebagai pelopor berdirinya Provinsi Riau melalui parlemen. Tulisan ini memberikan kontribusi bagi penulis mengenai perjuangan masyarakat Riau membentuk Provinsi Riau melalui parlemen, namun bagaimana kondisi Riau setelah menjadi Provinsi tidak dijelaskan dalam tulisan ini. (2) Gusti Asnan, “Sekolah dan Gerakan Daerah di Sumatera Tengah”, *Historia Journal of Historical Studies*, Vol. VII No. 2, December 2006, tulisan ini membahas tentang perkembangan sekolah di Sumatera Tengah dan Peranan dari Sekolah sebagai suatu gerakan daerah. Tulisan ini memberikan kontribusi bagi penulis untuk mengetahui kondisi pendidikan daerah Riau ketika berada dalam Pemerintahan Sumatera Tengah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini tidak hanya memusatkan perhatian pada kondisi pemerintahan Riau secara umum saja. Penelitian ini mengenai persoalan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah di bidang legislatif dan eksekutif, unit-unit administrasi daerah, serta beberapa kejadian yang khas untuk masing-masing periode pemerintahan daerah Riau, dan juga mengkaitkan kemampuan pemerintahan daerah Riau dalam membawa perubahan, baik dalam membangun infrastruktur maupun mensejahterakan masyarakat Riau baik itu dalam perekonomian daerah, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

1.5. Kerangka Analisis

Berbicara tentang Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah terkait dengan munculnya tuntutan-tuntutan masyarakat Riau untuk keluar dari dominasi

kekuasaan pemerintahan Sumatera Tengah. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain agar sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Dengan demikian, negara dapat dikatakan merupakan integrasi dari kekuasaan politik.²¹

Montesquieu membagi kekuasaan negara (pemerintahan) itu ke dalam tiga cabang yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif) terdiri dari anggota DPR, DPD, dan MPR²³, kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang (eksekutif) terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, serta kekuasaan mengadili terhadap undang-undang (yudikatif) yang terdiri dari Ketua MA, Jaksa Agung.

Sistem politik yang biasa dianut oleh sebuah negara memiliki beberapa tipe, di antaranya: totaliter, otoriter dan demokratis. Sistem politik totaliter mempunyai ciri kekuasaan yang bersifat mutlak pada diri pada seorang individu dengan dukungan militer yang kuat, dan partisipasi rakyat sangat terbatas. Sistem politik otoriter memiliki ciri-ciri di antaranya: kekuasaan pemerintah atau rezim sangat besar, misalnya melalui partai yang berkuasa, tetapi masih memberikan kesempatan pada partai-partai lain untuk hidup, setidaknya sebagai pelengkap. Partisipasi rakyat ada, sekurangnya diperlukan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Sistem politik demokratis ditandai dengan kekuasaan pemerintah juga boleh besar

²¹ Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 8

namun diperoleh melalui cara-cara yang konstitusional, misalnya lewat pemilu yang jujur dan adil, serta partisipasi rakyat besar.²²

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Riau nampak adanya campur tangan pemerintah pusat dalam penentuan kepala daerah di Indonesia secara umum, dan Riau khususnya. Hal ini bukan saja tentang monopolistik terhadap kekuasaan tetapi juga terjadi penguasaan terhadap sumber ekonomi daerah Riau. Sehingga monopolistik kekuasaan ini juga berpengaruh terhadap sosial, ekonomi dan budaya di dalam masyarakat di daerah Riau. Bahkan berujung kepada penolakan yang menyebabkan konflik terhadap respon kepemimpinan kepala daerah dalam masyarakat di daerah Riau.

Masa pemerintahan baik Orde Lama maupun Orde Baru dijalankan secara otoriter oleh pemerintahan pusat terhadap Pemerintahan Daerah Riau, dapat terlihat dari mendominasinya partai pemegang kekuasaan pada masa itu, Soekarno dengan PNI dan Soeharto dengan Golongan Karya. Sedangkan partai-partai lain seperti Perti, PSII, NU adalah sebagai pelengkap legitimasi kekuasaan.

Fenomena mengenai Riau Pascakeluar dari Sumatera Tengah (1957-1985) dapat juga ditelaah kritis dengan menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens. Dari telaah kritis tersebut setidaknya ada dua fenomena sentral yang hendak dijelaskan berdasarkan gagasan Giddens, yaitu hubungan pelaku-struktur dan sentralitas ruang-waktu.

Giddens melihat bahwa hubungan pelaku (*agency*) dan struktur adalah hubungan dualitas, tindakan (yang dilakukan pelaku) dan struktur saling

²² Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 28

mengandaikan. Pelaku menunjuk pada orang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia. Struktur ialah aturan dan sumber daya yang terbentuk dari dan membentuk keterulangan praktik sosial. Dualitas struktur pelaku terletak dalam proses di mana struktur sosial merupakan hasil dan sekaligus sarana praktik sosial.²³

Konstitusi ruang-waktu ini menempati posisi sentral dalam gagasan Giddens. Menurutnya, perbedaan bentuk-bentuk masyarakat bukan terletak pada perbedaan cara produksi seperti dijelaskan dalam Marxisme, melainkan dalam cara masing-masing masyarakat mengorganisasi hubungan antara ruang-waktu. Negara adalah pemuat kekuasaan yang didasarkan pada kontrol atas pengaturan ruang-waktu. Globalisasi sebagai perentangan sekaligus pemadatan waktu dan ruang. Individu dan masyarakat hidup dalam rentangan ruang dan waktu. Berdasarkan pengalaman Giddens tentang sentralitas ruang dan waktu tersebut, juga turut menyumbang lahirnya teori strukturasi. Secara garis besar teori strukturasi melibatkan hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu.²⁴

Dari berbagai prinsip strukturasi, Giddens memperlihatkan tiga gugus besar dalam struktur: (1) struktur signifikansi, menyangkut skemata simbolis, penyebutan, dan wacana; (2) struktur dominasi, yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi); (3) struktur legitimasi, menyangkut skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum. Penguasaan atas barang (ekonomi) dan orang (politik) akan melibatkan skemata

²³ Wirawan, I.B *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*.)Jakarta: PT. Prenadamedia). Hal: 311

²⁴ *Ibid*, hal. 312

dominasi, sebagaimana “penerapan sanksi” atas pelanggaran sebagai wujud pengandaian skemata legitimasi.²⁵

Dengan demikian melalui teori ini dapat dijabarkan bahwa masyarakat Riau ingin keluar dari Sumatera tengah adalah adanya ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan di Sumatera Tengah, ketika Riau digabungkan dalam Pemerintahan Sumatera Tengah berdasarkan UU No. 10 Tahun 1948 Ketidakpuasan tersebut diantaranya yaitu adanya pembagian jumlah kabupaten yang tidak seimbang antardaerah di Sumatera Tengah, jumlah kabupaten di Sumatera Barat lebih banyak dari pada di Riau. Ketidakpuasan juga dilihat dari dominasi orang Sumatera Barat dalam menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Ketidakpuasan lainnya yaitu mengenai tidak seimbangnya pembangunan pendidikan di Sumatera Tengah tahun 1950-an, di Sumatera Barat sudah ada beberapa fakultas yang berdiri sedangkan di Riau untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) belum tersedia.

Kebijakan Pemerintahan Sumatera Tengah ini menimbulkan ketidakpuasan dan menghasilkan tuntutan-tuntutan. Ketidakpuasan ini menghasilkan tuntutan-tuntutan dari kalangan masyarakat Riau untuk keluar dari Pemerintahan Sumatera Tengah dan bahkan berujung dengan tuntutan membentuk provinsi sendiri yang dipimpin oleh putera daerah Riau sendiri. Perjuangan untuk keluar dari Pemerintahan Sumatera Tengah dimulai dari munculnya kaum terpelajar sebagai agen yang memperjuangkan keinginan masyarakat Riau untuk keluar dari Sumatera Tengah.

²⁵*Ibid*, hal. 314

Kaum terpelajar umumnya terdiri dari murid-murid setingkat SLTP, SLTA, dan mahasiswa. Mereka ini adalah sekelompok warga masyarakat yang telah menyadari adanya ketimpangan dalam pembangunan daerah serta pembagian jatah daerah. Sementara itu, kelompok tokoh politisi Riau mulai matang dalam kancah perpolitikan. Beberapa putra daerah Riau mewakili rakyat Riau dan duduk di Parlemen. Di antaranya yaitu: Ma'rifat Marjani, Umar Amin Husein, dan Hanafi. Perjuangan keluar dari Sumatera Tengah dilakukan dari kongres ke kongres sampai dengan perjuangan parlemen.

Perjuangan masyarakat Riau untuk keluar dari Sumatera Tengah, seiring dengan lahirnya gerakan daerah menentang pemerintahan pusat yang dikenal dengan Dewan Benteng. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau juga tidak terlepas dari tindakan Dewan Benteng pada tanggal 7 Januari 1957 yang memutuskan untuk memberikan status otonomi daerah Tingkat I untuk Provinsi Riau dan Jambi. Pada tanggal 6 September 1957 Dewan Benteng meresmikan pembentukan tiga provinsi di Sumatera Tengah. Tindakan Dewan Benteng yang memproklamkan berdirinya PRRI, membuat pemerintahan pusat di Jakarta segera mengambil langkah untuk menghentikan pemberontakan daerah tersebut dan memutuskan untuk segera merealisasikan UU Darurat No.19 Tahun 1957, dengan tujuan memecah kekuatan PRRI.

Keluarnya UU No.19/1957 tentang pembentukan Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Soekarno 19 Agustus 1957, membuat para tokoh Riau di Jakarta sibuk untuk segera merealisasikannya. Diantara kegiatan di Jakarta adalah menentukan tokoh yang bakal menjadi Gubernur Riau sebagai salah satu simbol

keberadaan provinsi Riau yang baru. Beberapa kalangan masyarakat Riau membuat hitungan siapa putra daerah yang layak menjadi gubernur.

Pilihan jatuh kepada Sis Tjakradingrat. Oleh karena itu Wan Ghalib mengusulkan Sis Tjakradingrat sebagai Gubernur Riau kepada Ketua Penghubung Pembentukan Provinsi Riau. Usulan untuk mengangkat Sis Tjakradingrat, ternyata diterima oleh Menteri Dalam Negeri Sanusi Hardjadinata. Tetapi yang jadi masalah Presiden tidak menghendaknya menjadi Gubernur Riau. Pada akhirnya pilihan jatuh kepada Mr. S.M. Amin. Dengan demikian terlihat dominasi kekuasaan pemerintahan pusat pertama terhadap pemerintahan daerah Riau pasca berpisah dari Sumatera Tengah.

Selanjutnya dengan alasan keamanan daerah, maka pemilihan kepala daerah didominasi oleh anggota pensiunan ABRI yang disesuaikan dengan keinginan pemerintahan pusat. SM. Amin yang hanya menjabat selama 2 tahun digantikan oleh Kaharuddin Nasution.²⁶ Daerah Riau dipimpin dari Jenderal ke Jenderal ini berlanjut sampai masa pemerintahan orde baru yang otoriter. Pada tahun 1985, diakhir masa jabatan periode pertama Imam Munandar kembali dipilih sebagai calon Gubernur pilihan pemerintahan pusat. Ketika praktik keotoritarian pemerintahan pusat membawa persoalan bagi kesejahteraan masyarakat Riau, maka muncullah agen-agen dalam masyarakat Riau menuntut perubahan dengan cara menentang kebijakan dari pemerintahan pusat. Di antaranya tokoh Melayu H. Thamrin Nasution, H. Wan Ghalib, Ismail Suko, dan dr. Muchtar Lutfi.

²⁶ Taufik Ikram,dkk. *Dari Percikan Membentuk Propinsi Riau, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2002)*, hlm. 113

Dalam kenyataannya melalui pemilihan suara anggota DPRD Riau dimenangkan oleh Ismail Suko. Pemerintahan pusat tetap menginginkan Imam Munandar melanjutkan periode kedua sebagai Gubernur Riau. Ismail Suko diminta mundur. Awalnya terjadi penentangan terhadap keputusan pemerintahan pusat. Atas saran dari Thamrin Nasution, Ismail Suko mengundurkan diri, kemudian menduduki jabatan sebagai anggota MPR.

Masa Orde Baru melalui budaya patronase tindakan-tindakan sebagian dari masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap keputusan pemerintahan pusat dapat dipatahkan dengan cara memberikan kedudukan dalam birokrasi pemerintahan. Mudurnya Ismail Suko sebagai gubernur terpilih, menghancurkan mimpi masyarakat Riau untuk dipimpin oleh putera daerah Riau. Sehingga tuntutan akan kepemimpinan putera daerah yang didamba-dambakan hanyalah sebuah isapan jari belaka.

Patronase merupakan salah satu persoalan mendasar politik lokal ditingkat daerah. Gubernur, bupati, walikota, sering kali menguras kekayaan daerah melalui jaringan ekonomi-politik. Tujuannya tak lain adalah melanggengkan kekuasaan politik dan menumpuk kekayaan ekonomi. Patronase politik merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan tidak seimbang antara patron dan klien. Patron adalah seseorang yang memegang pucuk pelaksanaan kebijakan. Klien diidentikkan sebagai pengikut setia, pekerja birokrasi yang memenuhi aturan-aturan patron.²⁷

²⁷ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 60

Dominasi pemerintahan pusat terhadap sumber ekonomi Riau, dapat dilihat dari eksploitasi sumber daya alam Riau. Kebijakan pemerintahan pusat menjadikan Riau sebagai daerah eksploitasi, sementara masyarakat Riau tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan alamnya sendiri. Tanah-tanah ulayat masyarakat Riau dikuasai oleh perusahaan yang melakukan eksploitasi di daerah tersebut. Pembangunan di daerah Riau, seperti pembangunan jalan dan jembatan juga hanya untuk kepentingan kelancaran arus ekonomi perusahaan yang menguasai kekayaan Riau. Sumber Daya Alam yang kaya tidak mampu membawa kesejahteraan masyarakat Riau.

Dilihat dari segi pembangunan pendidikan di Riau pascakeluar dari Sumatera Tengah sudah terjadi peningkatan dalam ketersediaan jumlah sekolah maupun perguruan tinggi. Namun ketersediaan tenaga pengajar profesional belum sebanding dengan jumlah sekolah yang berkembang. Sehingga hasil dari pendidikan di daerah Riau belum menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Mengenai kualitas SDM dapat terlihat dari jabatan dalam pemerintahan daerah masih dikuasai dari orang-orang di luar Riau, dengan demikian SDM masyarakat Riau masih rendah.

Dari analisis ini akan terlihat bagaimana pelaksanaan pemerintahan daerah sehubungan dengan implementasi otonomi daerah di Riau yang dijalankan pada masing-masing periode baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Serta melihat sejauh mana pengaruhnya ini bagi kesejahteraan masyarakat Riau.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis, yang lazim digunakan oleh sejarawan dalam menyusun rekonstruksi sejarah. Penelitian ini harus memiliki beberapa kriteria, prinsip, dan aturan yang digunakan agar penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang baik. Louis Gottschalk menjelaskan ada empat tahap penting yang harus diteliti dalam penelitian yakni: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Kajian mengenai *Riau Pascakeluar dari Sumatera Tengah (1958-1985)* ditempuh melalui empat tahap. Pertama, heuristik merupakan tahap mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber data sejarah baik primer maupun sekunder. Sumber primer berupa dokumen dan arsip-arsip akan diperoleh melalui instansi-instansi pemerintahan di Riau, seperti Kantor Gubernur Prop.Riau, kantor DPRD Prop. Riau, kantor BPS Prop.Riau, kantor Badan Arsip Provinsi Riau dan kantor Arsip Kota Pekanbaru. Sumber primer yang ditemukan antara lain: Lembaran Negara RI Tahun 1983 No 48. Jakarta: Percetakan Negara RI, Lembaran Negara RI No. 13 1979. Jakarta: Percetakan Negara RI, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, Undang-Undang No. 61 Tahun 1958, Propinsi Daerah Tingkat I Riau. Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau kepada DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1981/1982, tahun 1984/1985, DPRD Provinsi Riau, Risalah Resmi DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Riau Masa Sidang III 1982/1983.

Sumber sekunder yang digunakan dalam bentuk buku, artikel, makalah, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang relevan dengan masalah penelitian akan

dilakukan melalui studi kepustakaan antara lain di Perpustakaan Wilayah Tingkat I Propinsi Riau, Perpustakaan BPS Riau, Perpustakaan Pemerintahan Kota Pekanbaru, Perpustakaan FISIPOL Pascasarjana Universitas Riau, Perpustakaan Universitas Riau, Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Riau, Perpustakaan Universitas Tabrani Rabb, Perpustakaan Universitas Lancang Kuning, perpustakaan FISIPOL Universitas Andalas, dan Perpustakaan Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sumber sekunder antara lain: berupa buku yaitu, Dep. Penerangan. 1953. *Propinsi Sumatera Tengah*. Djakarta, Lutfi, Muchtar. 1998. *Sejarah Riau*. Pekanbaru: Team Penyusunan dan Penulisan Sejarah Riau UNRI, Asnan, Gusti. 2006. *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: PT. Citra Pustaka, berupa majalah yaitu, Ahmad S Udi. "Menapaki Sejarah Pembentukan Provinsi Riau", *Tabloid Berita Azam*. No 30 Tahun I/Edisi 27 Juli - 2 Agustus 1999.

Melengkapi data akan dilakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, dosen-dosen yang meneliti tentang sejarah Riau, pegawai-pegawai instansi pemerintahan dan lain-lain, di antaranya yaitu H. Chaidir yang merupakan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau periode 1992-1997 dan juga penulis buku DPRD Riau dari masa ke masa 1971-2002, kemudian H. Septina Primawati yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019, beliau merupakan anak dari Alm. H. Ismail Suko dan juga merupakan Istri Rusli Zainal mantan Gubernur Riau.

Tahap kedua dilakukan kritik sumber, yakni merupakan tahap pengolahan data atau menganalisis sumber informasi yang dilakukan setelah semua bahan dan

sumber terkumpul. Kritik sumber dibedakan dalam bentuk eksternal dan internal. Kritik eksternal yaitu pengujian otensitas (keaslian) materialnya, secara klinis dan labor, kritik ini tidak bisa dijalankan karena keterbatasan alat-alat dan pengetahuan penulis. Sedangkan kritik internal untuk menguji dan membandingkan informasi sejarah yang terkandung didalamnya. Kedua tingkat pengolahan ini bertujuan untuk menyeleksi dan menyingkirkan bagian-bagian data yang tidak otentik dan kemudian menyimpulkan kesaksian yang bisa dipercaya dari bagian-bagian yang telah diseleksi dari data otentik.

Tahap ketiga adalah analisis-sintesis. Fakta yang diperoleh, baik dari sumber tertulis maupun lisan dianalisis dengan prosedural dan struktural. Analisis struktural digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa otonomi daerah. Analisis prosedural digunakan untuk menemukan perubahan dan perkembangan administrasi pemerintahan dan struktur birokrasi, pihak eksekutif dan legislatif di Riau dari masa ke masa sehubungan dengan otonomi daerah dan persoalan-persoalan yang ditimbulkannya. Tahap keempat yaitu tahap penulisan laporan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam enam bab. Bab pertama, Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dengan demikian permasalahan yang berkenaan dengan pentingnya penulisan tesis ini, tujuan dan lingkup persoalan serta sumber bahan yang digunakan terdapat dalam bab ini.

Bab kedua, Riau masa Pemerintahan Sumatera Tengah, menjelaskan tentang keadaan Riau pada masa Sumatera Tengah dimulai dari pembagian administrasi pemerintahan Riau, struktur pemerintahan serta keadaan Pendidikan dan ekonomi. Kemudian ide-ide berpisah dari Sumatera Tengah serta Perjuangan Keluar dari Sumatera Tengah.

Bab ketiga, Riau Pascakeluar dari Sumatera Tengah. Menjelaskan tentang pembentuk Provinsi Riau, dimulai dari pemindahan ibukota provinsi Tanjungpinang ke Pekanbaru, perkembangan kabupaten, dan kecamatan. Perkembangan aparatur pemerintahan Riau baik eksekutif dan legislatif dari tahun 1957-1985.

Bab keempat, Pembangunan Daerah Riau Pascakeluar dari Sumatera Tengah. Menjelaskan tentang pembangunan di daerah Riau setelah keluar dari Sumatera Tengah baik dari aspek pembangunan Infrastruktur Daerah, perekonomian daerah, serta pembangunan pendidikan. Dalam pembangunan tersebut juga akan terlihat pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Riau.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari seluruh isi tesis yang di dalamnya menjelaskan tentang keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah diajukan dalam tesis ini.

